

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan industri *fashion* dan tekstil meningkat drastis di abad ke 21. Pada rentang waktu tahun 2000 hingga 2014, produksi pakaian meningkat di mana konsumen membeli 60% lebih banyak pakaian dibandingkan 15 tahun sebelumnya. Industri fashion global setidaknya menghasilkan \$2.5 triliun setiap tahun dan mempekerjakan lebih dari 75 juta orang di mana 75% nya adalah wanita (Nagaraj, 2019). India merupakan salah satu negara yang berkontribusi besar dalam industri pakaian dan tekstil. Tahun 2017-18, tercatat sekitar 45 juta orang di India bekerja untuk industri tekstil. Menjadi produsen terbesar dan eksportir kedua terbesar, kebutuhan kapas sebagai bahan dasar utama tekstil di India mencapai 70% dalam konsumsi sehingga menjadikan kapas sebagai *white gold* yang telah dibudidayakan sejak 5,000 tahun yang lalu (India Law Offices, 2008). Sementara itu, sektor industri tekstil menyumbang sekitar 20% dari total industri India, 7.5% PDB dan mendatangkan pendapatan asing sekitar 32% (Jaybhaye, 2018).

Selama masa kolonial, pabrik-pabrik tekstil di India sudah berorientasi ekspor dan sangat kompetitif (Supriya & Vidya, 2012). Namun, baru pada akhir tahun 1980-an India memulai kebijakan liberalisasi pasar, menggiatkan ekspor kain, membuka aliran impor teknologi dan mesin di bawah *the 1985 National Policy on Textiles*. Menjadi

eksportir tekstil kedua terbesar setelah China, pendapatan dari industri tekstil India hingga bulan Juli 2019 mencapai angka \$250 miliar (Make in India, 2019). Uni Eropa merupakan pasar utama bagi ekspor tekstil India yang menerima 22% ekspor tekstil dan 43% pakaian jadi (India Law Offices, 2008). Sejak awal perjanjian dagang yang baru di tahun 1994, perdagangan tekstil India dengan Uni Eropa mengalami perkembangan dan pasang surut. Melihat pesatnya *global fast fashion*, pemerintah India menargetkan ekspor tekstil sebanyak \$31 miliar dan menarik investasi asing sebanyak \$11.93 miliar dalam periode 2018-2020 (Make in India, 2019).

Pada 2 Oktober 2016, pemerintah India mulai meratifikasi Perjanjian Paris dengan menargetkan penggunaan bahan bakar non-fossil hingga 40% di tahun 2030 (Climate Action Tracker, 2019). Pemerintah berkomitmen untuk mengubah sistem ekonominya agar lebih berkelanjutan berdasarkan UNSDGs dan Paris Accord sebagaimana pernyataan duta besar dan perwakilan India di PBB dan sejumlah organisasi internasional di Jenewa, Ajit Kumar (Sonowal, 2018). Untuk itu, pemerintah India mulai melakukan usaha-usaha untuk mentransformasi industri yang ramah lingkungan termasuk industri tekstilnya. Dalam sektor tekstil, perubahan kebijakan akan fokus pada target pemenuhan SDG 5: kesetaraan gender, SDG 6: air bersih dan SDG 7: energi terbarukan (Textile Exchange, 2018). Pemerintah akan menargetkan *2030 Agenda for Sustainable Development* menuju *New Big Textile Revolution*. Dengan mengedepankan industri yang menekankan kebijakan *reuse, repair, recycle*, industri India dapat mengurangi beban polusi, meningkatkan kualitas kesehatan dan ekonomi warga (UNIDO, 2019). Sektor tekstil di India

akan difokuskan pada penggunaan energi efisiensi dalam *the National Solar Mission*, pengolahan limbah *zero liquid discharge* dan berbagai kebijakan dalam kerangka *zero defect zero effect*.

Namun, industri yang ramah lingkungan seharusnya menjadi hal yang dihindari India. Industri ramah lingkungan bertentangan dengan usaha penuntasan kemiskinan, percepatan pembangunan dan industrialisasi di India yang saat ini gencar dilakukan (Jones & Saran, 2015). Selain itu, industri ramah lingkungan merupakan strategi yang *high cost* serta dapat menghambat India untuk mencapai target *\$10 trillion economy* di tahun 2030 yang sudah digagas sejak awal pemerintahan Narendra Modi (Saha & Misra, 2019). Industri ramah lingkungan tidak mudah dijalankan secara menyeluruh oleh negara berkembang. Dalam target menuju percepatan industrialisasi, konsumsi batubara semakin intens bahkan setelah India meratifikasi Perjanjian Paris. Penelitian mengungkapkan bahwa meskipun India mulai beralih ke energi matahari, batubara masih menjadi proyek penting pembangunan (Ebinger, 2016).

Sektor tekstil di India sendiri merupakan salah satu industri yang mengonsumsi energi paling dengan teknologi kuno terutama pada sektor yang terdesentralisasi. Produksi tekstil rumahan memakan energi 70-80% dari total produksi tekstil secara keseluruhan (Bhaskar, Verma, & Kumar, 2012). Sektor tekstil juga merupakan konsumen bahan kimia paling intens dalam negeri. Satish W. Wagh, mantan pimpinan perusahaan kimia *Chemexil*, mengatakan bahwa adanya batasan penggunaan bahan kimia dalam industri guna meminimalisir pencemaran merupakan hal yang dapat

menghambat proses pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang seperti India (Khan, 2019).

Ketergantungan akan batubara tersebut membuktikan bahwa India masih *pro* terhadap industri konvensional dengan energi efisien dan proses yang cepat. Oleh karena itu, perubahan ke lingkup industri yang lebih ramah lingkungan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Paris memunculkan kekhawatiran atas komitmen India tersebut. Proyek infrastruktur yang ambisius dan ekspansi sektor produksi di India diperkirakan akan semakin meningkatkan pengeluaran emisi CO<sub>2</sub> hingga 14% di tahun 2040 (Khadka, 2019). Dengan target waktu yang sama, ratifikasi Perjanjian Paris dengan target posisi sebagai tiga besar negara industri di dunia memunculkan dilemma dikotomi konsumsi-produksi di India.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini akan fokus pada pertanyaan *mengapa India mengadopsi kebijakan tekstil yang ramah lingkungan?*

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Ekonomi Politik Lingkungan Global**

Konsep ekonomi politik lingkungan tidak lepas dari kajian ekonomi politik global yang mengintegrasikan isu lingkungan dengan pasar. Ekonomi politik lingkungan menjadi diskursus global berdasarkan pendekatan *ecoholistic* yang meliputi perkembangan sosial-ekonomi serta hubungannya dengan lingkup sosial dan lingkungan (Balaam & Dillman, 2014). Perkembangan ekonomi politik ini digencarkan oleh kekuatan sipil global yang

menjadi fenomena dan aktor baru dalam hubungan internasional kontemporer. Kekuatan ini menjadi dominan dan alternatif ekopol (global) yang dapat merubah ritme lingkungan melalui interupsi atau perubahan lingkaran ekologis. Oleh karena itu, ekonomi politik mulai mempertimbangkan kekhawatiran terhadap lingkungan dan etika perdagangan terkait protes ideologi neoliberalisme atas liberalisasi ekonomi, privatisasi, dan kurangnya tanggung jawab yang dapat mempengaruhi sistem produksi dan pasar global (Gilpin, 2001).

Di sisi lain, Thomas dan Hines mengatakan bahwa perusahaan bermain sebagai aktor ekonomi yang berorientasi profit yang tidak memiliki tanggung jawab akan masyarakat maupun lingkungan yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam globalisasi ekonomi, apabila pusat pasar berdekatan dengan sumber daya produksi, maka sangat mungkin bagi pasar untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut tanpa memikirkan konsep keberlanjutan yang mana pasar akan mencari lokasi lain dengan kekayaan yang masih melimpah. Era produksi dan konsumsi masal pada dasarnya mengkaitkan antara akumulasi profit dan degradasi lingkungan yang tidak bisa dipisahkan sebagaimana pendapat Adam dan Kütting; *“ecological and technological processes do not share the same underlying principles according to which they evolve of function. Ecological processes are highly interactive, rhythmic, cyclical and ‘renewable’.* *Technological processes, on the other hand, are extremely linear, non-renewable”* (Adam & Kütting, 1995).

Terlepas dari pernyataan di atas, sistem produksi global bekerja atas permintaan pasar. Konsumen memainkan peran sebagai aktor utama dalam sumber

produksi suatu perusahaan. Beranjak dari hal tersebut, perusahaan akan memakai dalih ‘pengutamaan lingkungan dan praktik etis’ untuk mengimbangi standar konsumen masa kini dalam memperoleh keuntungan lebih sebagaimana pernyataan Clapp dan Dauvergne; “*business, here, is seen as an environmental leader, as the pursuit of profits becomes the pursuit of more efficient use of the environment*” (Clapp & Dauvergne, 2005). Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian yang menunjukkan bahwa terminologi *green* mulai menarik minat konsumen. Sebagian besar konsumen berpendapat bahwa ramah lingkungan, perdagangan yang adil hingga perlindungan hewan merupakan preferensi dan tanggung jawab bersama. Hal ini kemudian kembali memunculkan istilah politik konsumerisme ke dalam ranah global di mana konsumen memainkan peran atas aktivitas industri dan pemerintahan. Mazar dan Zhing menambahkan bahwa sebagian besar konsumen merasa puas setelah membeli produk yang mempertimbangkan etika dan lingkungan (Ethical Consumer, 2019). Dengan demikian, terdapat korelasi antara preferensi moral dengan permintaan pasar yang harusnya menjadi pertimbangan perusahaan dalam memenuhi standarisasi konsumen.

Komisi Uni Eropa pada tahun 2018 menyatakan bahwa kawasan tersebut mulai kritis dengan sumber yang berkelanjutan; yang minim kerusakan lingkungan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, regulasi yang jelas dan memadai hingga kondisi kerja yang layak. (International Trade Centre & European Commission, 2019). Kementerian Luar Negeri Uni Eropa bahkan memiliki platform *the centre for the promotion of imports* (CBI) yang memberi panduan standar ekspor ke Uni Eropa dan berbagai regulasi lain baik kebijakan lokal maupun

internasional terkait lingkungan dan aturan non-tarif lain (CBI Minister of Foreign Affairs, 2019). Pemberlakuan kebijakan tersebut bukan tanpa alasan, penelitian yang dilakukan hingga tahun 2017 menyebutkan setidaknya 4 dari 5 konsumen di Eropa lebih memilih produk ramah lingkungan yang disertifikasi langsung oleh organisasi-organisasi independen. Dengan ini, pemerintah India mengubah beberapa kebijakannya yang berkaitan dengan industri tekstil terkait permintaan pasar baru di 28 negara Eropa yang jumlahnya mencapai \$10 miliar pada tahun 2014 (Felbermayr, Mitra, Aichele, & Gröschl, 2016).

Sebelumnya di tahun 1997, 70 pewarna yang mengandung azo sudah dilarang oleh kementerian lingkungan dan perhutanan yang diumumkan melalui *Indian Import Policy*. Kementerian perdagangan bahkan mengharuskan eksportir tekstil untuk memiliki tes uji laborat di fasilitas yang memiliki sertifikasi ISO 17025 dari agen akreditasi nasional (fibre2fashion, 2014). Kebijakan mengenai pelarangan ini tidak lain merupakan respon dari larangan yang sama oleh Jerman di tahun 1994 dan Belanda di tahun 1996 yang akhirnya memimpin Uni Eropa memberlakukan standar umum bagi semua negara anggota (Textile Committee, 2014). Aturan yang diprakarsai Jerman dalam pelarangan penggunaan pewarna azo ini sempat menurunkan ekspor tekstil India yang 70% produk tekstilnya mengandung pewarna azo (Begum & Kumar, 2018).

Sejak adanya klausul lingkungan dan sosial yang dibawa Uni Eropa dalam membangun kerja sama, pemerintah India dinilai mulai mengadopsi kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan terutama sejak negosiasi kerja sama perdagangan (FTA) dengan Uni Eropa tahun 2007. Kebijakan seperti *National Action Plan*

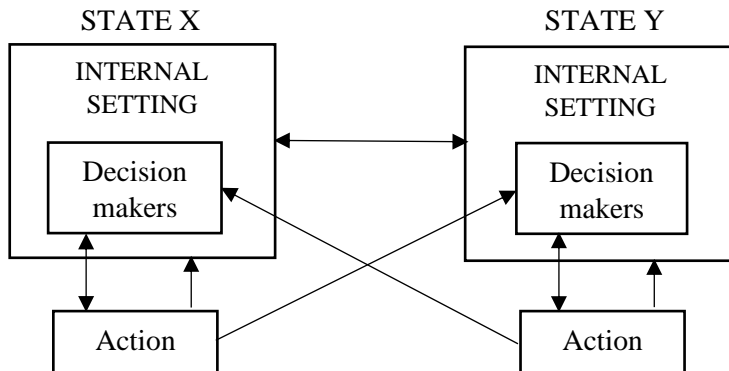
*on Climate Change* tahun 2008 dan *Singh Covergence Principle* oleh para pengamat seperti Thaker dan Leiserowitz dilihat sebagai salah satu bentuk respon dari standar-standar kerja sama Uni Eropa (Thaker & Leiserowitz, 2014). Pasca Uni Eropa mengeluarkan berbagai larangan bahan kimia dalam produk yang memiliki dampak terhadap kesehatan dan lingkungan melalui REACH, India kembali mempertimbangkan 7 jenis bahan kimia yang sering digunakan dalam tekstil seperti *formaldehyde*, cadmium, pentachlorophenol, hexavalent chromium, pestisida beracun, zat yang mengandung logam berat, zat yang mengandung halogen dan sebagainya (Textile Committee, 2014).

Oleh karena adanya standar-standar mengenai lingkungan maupun praktik etis di Uni Eropa, India sebagai salah satu pemasok tekstil ke kawasan tersebut kemudian mengadopsi kebijakan-kebijakan ramah lingkungan dengan logika bahwa apabila India tidak merespon standar-standar tersebut maka India akan kehilangan akses pasar terbesarnya sebagaimana pernyataan Clapp dan Dauvergne bahwa bisnis (India) sebagai pemimpin lingkungan karena pengejaran terhadap profit secara tidak langsung akan menginklusi klausul-klausul tentang lingkungan. Namun merujuk pada pernyataan Adam dan Kütting bahwa akumulasi profit dan konsep ramah lingkungan tidak bisa disatukan, India tidak lantas meninggalkan industri tekstil dengan sistem ekonomi linear (konvensional) dengan kontinuitas mengandalkan batubara sebagai sumber energi pokok yang efisien (Bhutoria, 2018).



## 2. Kebijakan Pembuatan Keputusan

Kebijakan pembuatan keputusan diperoleh melalui analisis multilevel, dari mikro-makro dan internal-eksternal (Afinotan, 2014). Snyder, Bruck dan Sapin berpendapat bahwa adanya aksi, reaksi dan interaksi turut mendefinisikan kebijakan suatu negara dalam proses pengambilan keputusan (Snyder, Bruck, & Sapin, 1969). Para aktor pembuat kebijakan bertindak atas refleksi kondisi sosial ekonomi, politis dan ideologis dalam negeri. Selain itu, preferensi aktor individu, partai politik, organisasi, kelompok etnis hingga korporasi menjadi bagian dari pembuatan kebijakan suatu negara (Afinotan, 2014). Pada level internal, para kelompok kepentingan mendesak pemerintah untuk dapat mengakomodasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara dalam level eksternal, pemerintah nasional akan memaksimalkan usaha mereka untuk dapat memenuhi tekanan domestik (Putnam, 1988). Para pembuat kebijakan di negara X dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan di negara Y melalui *action* atau sebaliknya. *Action* dari masing-masing negara dibuat oleh para pembuat kebijakan di mana *action* ini akan kembali masuk ke dalam proses pembuatan kebijakan (Snyder, Bruck, & Sapin, 1969).



Sumber diolah oleh Snyder, Bruck, dan Sapin, 1969

Politik domestik dan hubungan internasional turut berkontribusi dalam tercapainya kebijakan suatu negara yang seringkali mengalami tumpang tindih apakah keadaan dalam negeri dapat mempengaruhi hubungannya dengan negara lain atau sebaliknya. Robert D. Putnam berargumen bahwa politik dalam negeri menjadi lebih kuat karena adanya tekanan internasional di mana *“international pressure was a necessary for policy shifts”*. Dalam skripsi ini, faktor ekonomi akan menjadi pembahasan dominan sebagaimana ditekankan oleh Katzenstein, Alt, Evans dan Gourevitch bahwa pengaruh ekonomi internasional dalam politik domestik dan kebijakan ekonomi domestik merupakan kajian yang menarik. Katzenstein mengatakan bahwa, *“the main purpose of all strategies of foreign economic policy is to make domestic policies compatible with the international political economy”* (Putnam, 1988).

Globalisasi memicu adanya internasionalisasi ekonomi dan budaya. Ketika suatu negara mulai terbuka secara ekonomi, maka menjadi mungkin bagi masyarakat beserta regulasi dalam negeri untuk melebur ke dalam

kebudayaan dan sistem global. Pada akhirnya, garis antara politik domestik dan internasional menjadi *blur*. Berbagai isu mulai melintasi batas-batas negara yang menggabungkan isu domestik dan internasional menjadi satu dengan istilah *intermestic (international-domestic)*. *Intermestic* ini menjadi istilah bahwa perilaku aktor dan kekuatan transnasional saling mempengaruhi satu sama lain baik dalam isu maupun kepentingan (Hudson, 2014). Para pembuat kebijakan kemudian dihadapkan pada berbagai tantangan dalam berbagai level dan cakupan karena lingkungan pembuatan kebijakan tidak selalu obyektif.

Sektor tekstil yang menyumbangkan pendapatan nasional kedua terbesar di India berada di titik rendah dalam beberapa tahun terakhir dari dari 51% di awal tahun 2017 menjadi 45% di awal 2019 (Parashar, 2019). Di Uni Eropa, sebagai pasar terbesar tekstil India, ekspor menurun sebanyak 7% hingga квартал pertama tahun 2019 sementara ekspor kapas turun dari \$4.5 miliar tahun 2013-14 menjadi \$3.4 miliar tahun 2017-18. Turunnya kapasitas ekspor kapas dan pabrik ini mempengaruhi keseluruhan rantai produksi tekstil termasuk hilangnya lapangan kerja mulai dari agrikultur (kapas) hingga barang jadi (Suneja, 2019). Tahun 2005-06, Uni Eropa dan sejumlah negara Barat lain mulai memasukan klausul lingkungan dan sosial ke dalam kerangka kerja sama mereka dengan entitas lain atau yang diklasifikasikan sebagai hambatan non-tariff. Akibat adanya klausul lingkungan-sosial tersebut, negosiasi kerja sama (FTA) antara India dan Uni Eropa mengalami stagnasi di mana Uni Eropa mengatakan bahwa produk-produk tekstil India belum memenuhi standar impor di kawasan tersebut (European Commission, 2019).

Uni Eropa, yang melabeli dirinya sebagai pusat *sustainable apparel*, bahkan memiliki platform *the centre for the promotion of imports* (CBI) yang memberlakukan standar ke ekspor ke kawasan terkait lingkungan dan aturan non tarif lain (CBI Minister of Foreign Affairs, 2019). Dengan adanya aturan-aturan dari Uni Eropa yang mengharuskan adanya *labelling* dan transparansi mengenai lingkungan dan praktik etis terutama pasca negosiasi FTA pertama, India mulai secara bertahap mengadopsi kebijakan tekstil yang lebih ramah lingkungan hingga sampai pada ratifikasi Perjanjian Paris pada Oktober 2016 dengan *tagline New Big Textile Revolution* (UNIDO, 2019). Sebagaimana pernyataan di atas bahwasannya tekanan internasional, dalam konteks ini Uni Eropa melalui bentuk kebijakan ramah lingkungannya, menjadi penyebab adanya *policy shift* di India terutama dalam industri tekstil atas adanya permintaan pasar baru yang menginginkan nilai-nilai etis dan perlindungan lingkungan di dalamnya.

Meskipun demikian, India tidak lantas meninggalkan industri tekstil konvensional yang telah lama menopang pendapatan negara terkait produksi yang cepat dan murah. Kebijakan India ini lebih tepat dikaitkan dengan analisis area pasar (*market area analysis*) oleh Chaudhuri bahwasannya produksi barang (dalam hal ini tekstil) mengikuti spesialisasi berdasarkan permintaan dari pembeli di kawasan tertentu (Chaudhuri, 1978). Ilustrasi yang dapat disimpulkan adalah bahwa India melihat adanya dua alternatif pasar yang mendorong pemerintahan Modi mengadopsi sistem industri tekstil ganda karena konsumsi batubara justru mengalami kenaikan pada rentang April-Juni 2019. Industri tekstil tentu tidak lepas dari penyokong utama pertumbuhan ekonomi di mana

Kementerian tekstil India dalam *Vision, Strategy and Action Plan for Indian Textile and Apparel Sector* memproyeksikan penambahan penyerapan tenaga kerja hingga 36 juta dan level produksi mencapai \$350 miliar tahun 2024-25 (Make in India, 2017). Adanya keputusan untuk mentransformasi sejumlah kebijakan tekstil yang ramah lingkungan dinilai sebagai strategi untuk mengakomodasi pasar baru di Uni Eropa.

#### **D. Hipotesa**

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas yang didasarkan pada latar belakang dan kerangka pemikiran, penulis mengajukan kesimpulan sementara bahwa India mulai mengadopsi sejumlah kebijakan industri tekstil yang ramah lingkungan karena adanya kebijakan pasar di Uni Eropa yang menekankan nilai-nilai etis dan terminologi *green* sebagai bagian dari strategi India memperoleh akumulasi profit yang lebih massif.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui peran norma internasional dalam mengubah preferensi masyarakat internasional atas praktik-praktik dasar korporasi dan pemerintah
2. Memahami bagaimana pemerintah India menggunakan isu lingkungan dalam industri tekstil untuk memperoleh profit lebih

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan peroleh data sekunder. Teknik pengumpulan berupa *library research* atau penelitian

kepuustakaan melalui *academic literature*, laporan resmi pemerintah, jurnal serta berita, artikel dan data elektronik yang kredibel dan relevan.

## G. Sistem Penulisan

Susunan skripsi ini terdiri atas;

- **BAB I**  
Melampirkan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis dan metode penelitian.
- **BAB II**  
Mengeksplorasi industri tekstil India serta dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas industri tekstil India. Dalam bagian ini juga akan dijelaskan Uni Eropa sebagai pasar terbesar tekstil India beserta isu lingkungan-sosial (*non-tariff*) yang menjadi hambatan membangun kerja sama yang baru di antara kedua pihak.
- **BAB III**  
Menjawab hipotesis bahwa adanya kebijakan lingkungan-sosial yang diinklusi Uni Eropa dalam menjalin kerja sama dengan entitas lain menjadi faktor perubahan kebijakan tekstil India ke arah yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi akumulasi profit.
- **BAB IV**  
Merangkum keseluruhan skripsi berdasarkan argumen penulis yang dilengkapi data serta paparan dari sumber lain yang relevan.